POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAKASSAR

VISI

PERCEPATAN MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG "SOMBERE' DAN SMART CITY" DENGAN IMUNITAS KUAT UNTUK SEMUA

MISI

MISI 3: RESTORASI RUANG KOTA YANG INKLUSIF MENUJU KOTA NYAMAN KELAS DUNIA YANG SOMBERE DAN SMART CITY UNTUK SEMUA

TUJUAN SKPD

1. MENINGKATKAN PENYEDIAAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR TIK YANG TERSTANDARISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SMART CITY
2. MEWUJUDKAN KEAMANAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ATAU E-GOVERNMENT

MEWUJUDKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS INTERNAL

SASARAN

1. TERWUJUDNYA JARINGAN INTERNET YANG AMAN DAN HANDAL DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
3. TERWUJUDNYA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
4. MENINGKATNYA KESADARAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INSTANSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTCOME

1. PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS
2. PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
3. PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
6. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3. Jumlah Mebel yang Dipelihara
4. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5. umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
6. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

INDIKATOR OUTCOME

1. PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI
2. PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
3. Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
4. Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
5. Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
6. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
7. umlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

INDIKATOR OUTCOME

1. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
2. PERSENTASE PENINGKATAN PENGUNJUNG PERTAHUN PADA WEBSITE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
3. PERSENTASE PENINGKATAN DATA PERTAHUN YANG TER-UPDATE PADA OPEN DATA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5. umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
7. Jumlah Layanan Hubungan Media
8. Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
9. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis
10. Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya
11. Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
12. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

INDIKATOR OUTCOME

1. YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2. PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegras
3. Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
4. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
5. Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

INDIKATOR OUTCOME

1. TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH
2. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
2. Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. umlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR OUTPUT

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi